

**PERATURAN DESA KALIPELUS**

**NOMOR 15 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KALIPELUS TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIPELUS ,

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa **Kalipelus** Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten; 2. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; 3. bahwa dikarenakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa telah berakhir di tahun 2020, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 berdasarkan Pedoman Sinkronisasi dan Transisi Perencanaan Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Perencanaan Desa Tahun 2021; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa **Kalipelus** Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021; |
| Mengingat : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID -19 ) dan /atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasioanal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);** 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 16. **Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal ,Dan Transmigrasi Republik Indonesia ( PDTT RI ) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);** 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32); 23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9); 24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27); 25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28); 26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47); 27. **Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;** 28. Peraturan Desa **Kalipelus** Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa **Kalipelus** Tahun 2018 Nomor 08 ); 29. Peraturan Desa **Kalipelus** Nomor 09 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa **Kalipelus** Tahun 2018 Nomor 09 ); 30. Peraturan Desa **Kalipelus** Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa **Kalipelus** Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa **Kalipelus** Tahun 2020 Nomor 04 ); 31. Peraturan Desa **Kalipelus** Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa **Kalipelus** Tahun 2019 Nomor 05 ); 32. Peraturan Desa **Kalipelus** Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa **Kalipelus**  (Lembaran Desa **Kalipelus** Tahun 2019 Nomor 07 ); |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPELUS

dan

KEPALA DESA KALIPELUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERNTAH DESA KALIPELUS KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KALIPELUS KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

* + - 1. Desa adalah Desa **Kalipelus**
      2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
      3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
      4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
      5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
      6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
      7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
      8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
      9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
      10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
      11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
      12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
      13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
      14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
      15. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
      16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
      17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
      18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
      19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
      20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN

DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

RKP Desa

Pasal 2

* + - 1. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
      2. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
      3. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Bagian Kedua

Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 3

1. Daftar Usulan RKP Desa merupakan penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
2. Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
3. Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan Kabupaten.

BAB III

SISTEMATIKA RKP Desa

Pasal 4

RKP Desa terdiri atas sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN;
2. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2019 DAN

CAPAIAN KINERJA TAHUNAN;

1. BAB III RANCANGAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA;
2. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA;
3. BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DESA BERDASARKAN

BIDANG, DAN SUB BIDANG SERTA INDIKATOR KINERJA

TAHUNAN; dan

1. BAB VI PENUTUP.

Pasal 5

Dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

PERUBAHAN RKP Desa

Pasal 7

1. RKP Desa dapat diubah dalam hal :
2. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
3. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten; atau
4. informasi pagu Indikatif Desa baru disampaikan oleh Bupati setelah Kepala Desa menetapkan RKP Desa menggunakan pagu tahun sebelumnya.
5. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
   1. berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
   2. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
   3. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
   4. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
6. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
   1. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
   2. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
   3. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
   4. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
7. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan informasi pagu Indikatif Desa baru disampaikan oleh Bupati setelah Kepala Desa menetapkan RKP Desa menggunakan pagu tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
   1. Mencermati pagu indikatif Desa yang baru disampaikan oleh Bupati;
   2. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas informasi pagu Indikatif Desa baru disampaikan oleh Bupati setelah Kepala Desa menetapkan RKP Desa menggunakan pagu tahun sebelumnya;
   3. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
   4. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 8

1. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa.
2. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus, terjadinya perubahan mendasar, dan/atau informasi pagu Indikatif Desa baru disampaikan oleh Bupati setelah Kepala Desa menetapkan RKP Desa menggunakan pagu tahun sebelumnya.
3. Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
4. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa atau perubahan APB Desa.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Kalipelus

pada tanggal, 23 Desember 2020

KEPALA DESA KALIPELUS

**HARTINIGSIH**

Diundangkan di Kalipelus

pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DESA,

**SUPANGAT**

LEMBARAN DESA KALIPELUS KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 14

**LAMPIRAN**

**PERATURAN DESA KALIPELUS**

**NOMOR 15 TAHUN 2020**

**TENTANG**

***RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KALIPELUS TAHUN 2021***

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KALIPELUS**

**PERUBAHAN TAHUN 2021**

**PEMERINTAH DESA KALIPELUS**

**KECAMATAN PURWANEGARA**

**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**TAHUN 2021**



**PERATURAN DESA KALIPELUS**

**NOMOR 15 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KALIPELUS TAHUN ANGGARAN 2021**

**KECAMATAN PURWANEGARA**

**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BAB I**

PENDAHULUAN

**A. LATAR BELAKANG**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun penjabarannya berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun. Baik RPJM Desa maupun RKP Desa menjadi Pedoman dan dasar dalam Penyusunan APB Desa yang semua ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sehingga Dokumen RKP Desa hukumnya wajib ada dan memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Desa selama 6 tahun yang mengacu pada RPJMD Kabupaten yang dijabarkan menjadi RKP Desa yang merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa. Dikarenakan pada tahun 2019 RPJMDesa 2013-2019 telah berakhir, maka dalam Penyusunan RKPDesa tahun 2020 ini berpedoman dengan pedoman sinkronisasi dan transisi arah kebijakan Perencaan Daerah Kabupaten dengan arah kebijakan perencanaan Desa.

Dalam RPJM Desa terdapat Pedoman transisi yang disusun terpadu untuk menjaga kesinambungan pembangunan Desa dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan Desa. Pedoman transisi digunakan untuk membantu Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang ditugaskan mengisi kekosongan dalam penyusunan RKP Desa tahun 2020 dan Daftar Usulan RKPDesa Tahun 2021. RKPDesa Tahun 2020 sebagai pedoman penyusunan APB Desa Tahun 2020.

Kegiatan dalam RKPDesa tahun 2020 yang merupakan tahun transisi dapat disusun berdasarkan Bidang dan Sub Bidang yang terdapat dalam RPJM Desa dengan mengacu pada Pedoman Sinkronisasi dan Transisi Arah Kebijakan Perencanaan Daerah Kabupaten dengan Perencanaan Desa untuk Penyusunan RKPDesa 2020 dan Daftar Usulan RKPDesa 2021 yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Desa terkini melalui Musyawarah Perencaan Pembangunan Desa.

Arah kebijakan Perencanaan Daerah Kabupaten tersebut adalah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2020, RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 dan RKPD Kabupaten Tahun 2020 serta Pedoman Sinkronisasi dan Transisi Arah Kebijakan Perencanaan Daerah Kabupaten dengan Perencanaan Desa untuk Penyusunan RKPDesa 2021 dan Daftar Usulan RKPDesa 2022.

**B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

RKP Desa **Kalipelus** Tahun 2021 disusun berdasarkan pada:

|  |
| --- |
| 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID -19 ) dan /atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasioanal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);** 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 16. **Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal ,Dan Transmigrasi Republik Indonesia ( PDTT RI ) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);** 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32); 23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9); 24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27); 25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28); 26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47); 27. **Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;** 28. Peraturan Desa **Kalipelus** Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa **Kalipelus** Tahun 2018 Nomor 08 ); 29. Peraturan Desa **Kalipelus** Nomor 09 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa **Kalipelus** Tahun 2018 Nomor 09 ); 30. Peraturan Desa **Kalipelus** Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa **Kalipelus** Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa **Kalipelus** Tahun 2020 Nomor 04 ); |

**C. MAKSUD DAN TUJUAN**

RKPD Desa **Kalipelus** Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk:

* + - * 1. Melanjutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa **Kalipelus** Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 - 2025 ke dalam rencana program kegiatan berdasarkan bidang dan sub bidang prioritas Desa **Kalipelus** Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 dengan mengacu pada arah kebijakan kabupaten Banjarnegara tahun 2021 berupa RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2017-2022 dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2017-2020 serta Pedoman Sinkronisasi dan Transisi Arah Kebijakan Perencanaan Daerah Kabupaten dengan Perencanaan Desa untuk **Penyusunan RKPDesa 2021 dan Daftar Usulan RKPDesa 2022** yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Desa terkini.
        2. Menyelaraskan **Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2022** dengan sasaran dan program yang yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022;
        3. Menciptakan sinergi antara program kegiatan berdasarkan bidang dan sub bidang prioritas Desa **Kalipelus** antar wilayah, antar kewenangan Desa, dan antar tingkat pemerintahan;
        4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Desa **Kalipelus** Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan APB Desa **Kalipelus** Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021;

Menjadi pedoman dalam penyelenggaran pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa, Desa **Kalipelus** Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020;

**Menghasilakn Daftar Usulan RKP Desa tahun 2022 yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah**; dan

Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan Desa yang baik.

**D. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan Desa, maka keberadaan RKP Desa **Kalipelus** Tahun 2021 adalah merupakan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa **Kalipelus** Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 - 2025 yang disesuaikan dengan arah kebijakan kabupaten Banjarnegara tahun 2021 berupa RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2017-2022 dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2017-2020 serta Pedoman Sinkronisasi dan Transisi Arah Kebijakan Perencanaan Daerah Kabupaten dengan Perencanaan Desa untuk Penyusunan RKPDesa 2021 dan Daftar Usulan RKPDesa 2022 dan sesuai kondisi kebutuhan Desa terkini. Dan juga sebagai bahan masukan dalam menyelaraskan dengan sasaran dan program Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2022 dengan RKPD dan RENJA Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022.

RKPDesa tahun 2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Desa **Kalipelus** khususnya dalam menjalankan agenda penyelenggaran pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman dalam **penyusunan APB Desa Tahun 2021**.

Selanjutnya, RKP Desa untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan **Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) Desa Kalipelus Tahun 2021**.

Sedangkan Daftar Usulan RKP Desa Kalipelus Tahun 2022 yang menjadi bagian dari RKP Desa Kalipelus Tahun 2022 ini akan menjadi usulan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah yang akan menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan Kabupaten.

**BAB II**

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2019**

**DAN CAPAIAN KINERJA TAHUNAN**

1. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan berdasarkan Bidang dan Sub Bidang Tahun 2019
   * + 1. ***Bidang Penyelenggaran Pemerintahanan Desa***
2. ***Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan*** ***Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa***

**Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan :**

1. Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dari ADD
2. Belanja Pegawai Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Pengelolaan tanah bengkok
3. Belanja Tunjangan Kedudukan BPD
4. Belanja Pegawai Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa

( PTPKD )

1. Belanja Pegawai Tunjangan petugas profil desa.

**1.Kegiatan Operasional Perkantoran :**

1. Belanja ATK
2. Belanja Barang dan jasa Listrik dan air
3. Belanja Benda Pos
4. Belanja alat listrik
5. Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih
6. Belanja Cetak dan foto copi
7. Belanja makam minum rapat
8. Belanja barang dan jasa /Upah Pekerja Desa
9. Belanja pemeliharaan/perawatan kendaraan bermotor ( Mobil ambulan dan sepeda motor )
10. Belanja Perjalanan dinas
11. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi
12. Belanja Transakasi dan keuangan admin Bank
13. Belanja Pajak mobil Ambulan Desa dan Mobil Opersional Desa
14. Belanja modal peralatan Kantor
15. Belanja barang dan jasa pajak tanah kas Desa

**2.Kegiatan operasional BPD :**

* Operasional BPD

**3.Kegiatan operasional RT dan RT :**

* Belanja insentiv RT dan RW

**4.Kegiatan Saran dan Prasarana Kantor :**

* Belanja Peralatan Kantor

**5.Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa**

* Belanja ATK,Perjalanan Dinas,Makan minum rapat

**6.Kegiatan Pengelolan Informasi Desa**

**-** Belanja aset dan keuangan desa (Petugas Aset Desa dan Operator SID )

1. ***Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :***

* Kegiatan Penjaringan Kepala Desa dan perangkat desa

***( Penjaringan dan penyaringan jabatan Kepala Desa Kalipelus )***

* + - 1. **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

1. **Sub Bidang Pendidikan**

***Kegiatan Pembinaan kerukunan umat beragama :***

* Belanja Jasa upah tenaga kerja : Insentiv Guru TPQ

1. **Sub Bidang Kesehatan:**

- Kegiatan Pemberdayaan Posyandu :

- Belanja Barang dan jasa :

a. Belanja makan minum rapat FKD

b. Belanja Jasa upah Tenaga kerja : Insentiv Kader Posyandu dan

SKD,Insentif FKD

1. **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,**
2. **Kegiatan Pembangunan saluran irigasi**

* Belanja Modal Pembangunan Drainase Dusun Tambangan;
* Belanja Modal Pembangunan Drainase Dusun Penusupan;
* Belanja Modal Pembangunan Drainase Rt 03 Rw 05

1. **Kegiatan Pembangunan Jalan Desa**

* Belanja Modal Pengaspalan Jl Dusun Kalipelus Rt 01 Rw 03;
* Belanj Modal Pengaspalan Jl Dusun Temanggungan Rt 01 Rw 02;

1. **Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasaran Fisik Sosial**

* Belanja Barang di berikan masyarakat : Pembangunan RTLH bagi keluarga miskin ( dari Dana Desa dan Bantuan Keuangan Provinsi )
  + - 1. ***Bidang Pembinaan Kemasyarakatan***

1. **Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat .**

**Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:**

***Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban :***

1. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja : Honor LINMAS
2. **Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**

**Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan**:

***Kegiatan Pembinanaa Organisasi Perempuan /PKK :***

- Belanja Pegawai : Tunjangan Pengurus PKK

- Belanja Barang dan jasa : ATK dan Perjalanan Dinas

***Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatn Desa***

* Belanja Pegawai : Tunjangan Kelembagaan LP3M
* Belanja Barang dan jasa : ATK LP3M dan KPMD
* Blanja Jasa upah tenaga kerja : Transport rakor KPMD

1. **Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**

**Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan :**

* Belanja Barang di berikan masyarakat : Lomba-lomba HUT RI di Dusun-Dusun
  + - 1. ***Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa***

1. **Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga**

**Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:**

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil

* Belanja barang di berikan masyarakat : Pemberikan paket sembako pada Rumah Tangga Miskin

1. **Sub Profil Desa**

Kegiatan Belanja Pegawai : tunjangan Operator Profil Desa

* + - 1. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

***Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa belum di anggarkan dan di laksanakan TA 2019***

1. **Capaian Kinerja Tahunan**

Capaian Kinerja Tahunan Pemerintah Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara di Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **Capaian Indikator Kinerja** | | | | |  | |  | |  |
|  |  | | **RKP Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara**  **Tahun 2019** | | | | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INDIKATOR KINERJA** | | | | **SATUAN** | **TARGET KINERJA TAHUN 2019** | **CAPAIAN KINERJA**  **TAHUN 2019** | | **STATUS CAPAIAN TAHUN 2018 (Tercapai/ Belum Tercapai)** | |
|  | *1* | | | | *2* | *3* | *4* | | *5* | |
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | | | |  |  |  | |  | |
|  | Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa | | | |  |  |  | |  | |
|  |  | 1.Tersedianya sarana perkantoran/ pemerintahan Desa | | | % | 80 | 100 | |  | |
|  |  | 2.Terkelolanya Aset Desa | | | % | 70 | 100 | |  | |
|  |  |  | | |  |  |  | |  | |
|  | Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan | | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | 1.Kepemilikan KTP-el | | | % | 85 | 90 | |  | |
|  |  | 2.Rasio bayi berakte kelahiran | | | % | 90 | 98 | |  | |
|  |  | 3.Rasio Pasangan berakte nikah | | | % | 90 | 97 | |  | |
|  |  | 4.Pengelolaan Arsip secara Baik | | | % | 50 | 75 | |  | |
|  | Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan | | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | 1.Tersedianya Perdes RPJMDesa | | | Dokumen | **1** | **1** | |  | |
|  |  | 2.Tersedianya Perdes RKPDesa | | | Dokumen | **1** | **1** | |  | |
|  |  | 3.Tersedianya Perdes APBDesa | | | Dokumen | **2** | **2** | |  | |
|  |  | 4.Tersedianya Perdes LPJ APBDesa | | | Dokumen | **1** | **1** | |  | |
|  |  | 5.Tersedianya Dokumen LKPPDesa, LPPDesa, AMJ dan ILPPDesa | | | Dokumen | **3** | **3** | |  | |
|  |  | 6.Meningkatnya Jumlah PADesa | | | Rp. Juta | **12** | **12** | |  | |
|  | Sub Bidang pertanahan | | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | 1.Sertifikasi Tanah Kas Desa/Bengkok | | | Bidang | **-** | **-** | |  | |
|  |  | 2.Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | | | % | **100** | **100** | |  | |
|  |  |  | | |  |  |  | |  | |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | | | |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  | Sub Bidang Pendidikan | | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | 1. Fasilitas PAUD milik Desa dalam kondisi baik | | | % | **100** | **100** | |  | |
|  |  | 1. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) | | | % | **82** | **93** | |  | |
|  |  | 1. Fasilitas Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa dalam kondisi baik | | | % | **-** | **-** | |  | |
|  |  |  | | |  |  |  | |  | |
|  | Sub Bidang Kesehatan | | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | 1.Persentase Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif | | | % | **95** | **98** | |  | |
|  |  | 2.Menurunnya Angka Kematian Bayi | | | Kasus | **0** | **0** | |  | |
|  |  |  | | |  |  |  | |  | |
|  |  | 3.Menurunnya Angka Kematian Balita | | | Kasus | **0** | **0** | |  | |
|  |  | 4. Menurunnya Balita Gizi Buruk | | | Kasus | **3** | **3** | |  | |
|  |  | 5.Menurunnya Angka Kematian Ibu | | | Kasus | **0** | **0** | |  | |
|  |  | 6.Fasilitas Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ Pos Kesehatan Desa dalam kondisi baik | | | % | **80** | **90** | |  | |
|  |  | 7. | | |  |  |  | |  | |
|  | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | 1.Panjang jalan Desa dalam kondisi baik | | | % | **80** | **90** | |  | |
|  |  | 2.Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang bersih dan aman | | | % | **90** | **95** | |  | |
|  |  |  | | |  |  |  | |  | |
|  | Sub Bidang Kawasan Permukiman | | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | 1.Rasio Rumah Layak Huni | | | % | **75** | **95** | |  | |
|  |  | 2.Persentase penduduk yang terlayani sanitasi dan air limbah yang memadai | | | % | **60** | **60** | |  | |
|  |  | 3.Rasio Rumah memiliki akses Jamban Sehat | | | % | **70** | **85** | |  | |
|  |  |  | | |  |  |  | |  | |
|  | Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup | | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | 1.Bertambahnya Penghijauan/ pelestarian lingkungan hidup | | | % | **75** | **90** | |  | |
|  |  | 2.Persentase Penanganan Sampah | | | % | **65** | **70** | |  | |
|  | Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika | | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | 1.Persentase Warga Desa yang bisa mengakses jaringan internet | | | % | **90** | **50** | |  | |
|  |  | 2.Penyelenggaraan informasi publik Desa (pembuatan poster/baliho informasi APBDesa dan/atau APBDesa) untuk warga dan lain-lain | | | Dokumen | **3** | **3** | |  | |
|  | Sub Bidang energi dan sumber daya mineral | | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | 1.Pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna di Desa | | | Jenis | **-** | **-** | |  | |
|  | Sub Bidang Pariwisata Desa | | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | 1.Kunjungan Wisatawan ke Desa | | | Orang |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  |  | |  | |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKAT DESA | | | | |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  | Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat | | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | 1.Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas | | | Kegiatan | **1** | **1** | |  | |
|  |  |  | | |  |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  |  | |  | |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | | | | |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | 1.Populasi Kambing/Domba | | | Ekor | **102** | **135** | |  | |
|  |  | 2.Populasi Sapi | | | Ekor | **23** | **26** | |  | |
|  | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | 1.Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaran Desa | | | Kegiatan | **-** | **-** | |  | |
|  |  | 2.Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa/ Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kader Kesehatan Masyarakat Desa | | | Kegiatan | **1** | **1** | |  | |
|  |  | 3.Terfasilitasinya Kegiatan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangun Desa | | | Kegiatan | **3** | **3** | |  | |
|  |  |  | | |  |  |  | |  | |
|  | Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga | | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | 1.Penyandang Cacat (difabel / disabilitas) dan eks trauma yang mendapatkan pelayanan sosial dasar | | | Orang | **3** | **3** | |  | |
|  |  | 2. Penanganan Keluarga Miskin (BDT) | | | Rumah Tangga Miskin | **10** |  | |  | |
|  | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah | | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | 1. Jumlah UMKM di Desa | | | Usaha |  |  | |  | |
|  | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | 1.Terbentuknya BUMDesa | | | Jenis Usaha | **1** | **2** | |  | |
|  |  | | | |  |  |  | |  | |
|  | DST. | | | | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  |  | |  | |

1. Permasalahan dan Isu Strategis

Dari hasil evaluasi penyelenggaraan penyelenggaran pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa Kalipelus, terdapat beberapa permasalahan penyelenggaran pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa antara lain:

1. ***Anggaran dari Dana Desa dengan skala prioritas masih banyak yang belum bisa di laksanakan secara maksimal,***
2. ***Alokasi Dana Desa ( ADD ) yang sangat sedkit untuk kegiatan oprasioanal Pem.Desa***

Dari hasi identifikasi permasalah penyelenggaran pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa tersebut dapat ditarik isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian sebagai prioritas penyelenggaran pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak di Desa Kalipelus yakni sebagai berikut:

Tabel

Prioritas dan Isu Strategis Desa Kalipelus berdasarkan Bidang

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bidang** | **Prioritas Permasalahan** | **Isu Strategis** |
| penyelenggaran pemerintahanan Desa, | Terbatasnya sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa ( ADD ) untuk keg Oprasional Pemerintah Desa |  |
| Adanya penambahan ADD ,karena Dana Desa tdk bisa di alokasikan pada Bid.Pemerintah Desa |
|  |  |
| Pelaksanaan Pembangunan Desa | Terbatasnya anggaran untuk infrastruktu dan kegiatan di bid.Kesehatan dan Pendidikan |  |
| Proses pencairan tahap demi tahap |
|  |  |
| Pembinaan Kemasyarakatan | Terbatasnya sumberanggaran untuk kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan |  |
| Kurangnya laokasi anggaran untuk bid.Pembinaan Kemasyarakatan |
|  |  |
| Pemberdayaan Masyarakat Desa | Peranserta dukungan dari Pemerintah Daerah | Dukungan pemberdayaan Masyarakatdari Pemerintah Pusat dan Daerah |
|  |
|  |  |
| Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa |  |  |
|  |
|  |  |

**BAB III**

**RANCANGAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Kebijakan Keuangan Desa tahun 2021 tidak dapat dilepaskan dari kapasitas kemampuan keuangan Desa. Maka dari itu kebutuhan belanja bidang, sub bidang dan kegiatan pada RKP Desa 2021 ini wajib memperhatikan kemampuan keuangan Desa tersebut. Rencana pendapatan Desa untuk kerangka pendanaan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum dalam penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi komponen Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Transfer, dan Pendapatan lain-lain.

Dengan mencermati potensi pendapatan daerah, anggaran perubahan tahun 2019, dan anggaran pada awal tahun 2020, maka proyeksi keuangan daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel

**Pendapatan Desa Kalipelus**

**Tahun 2019 - 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **APB Desa Perubahan** | **APB Desa** | **Proyeksi** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| ***A.*** | ***PENDAPATAN*** | ***1.790.000.000*** | ***1.878.498.000*** | **1.988.909.500** |
|  |  |  |  |  |
| ***1.*** | ***Pendapatan Asli Desa*** | ***396.040.000*** | ***413.900.000*** | ***412.650.000*** |
| a. | Hasil Usaha | *1.200.000* | *1.200.000* | 1.200.000 |
| b. | Hasil Aset | *394.840.000* | *412.700.000* | 411.450.000 |
| c. | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***2.*** | ***Pendapatan Transfer*** | ***1.391.821.000*** | ***1.407.678.000*** | ***1.534.159.000*** |
| a. | Dana Desa | *920.502.000* | *932.901.000* | 894.420.000 |
| b. | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten | *18.367.000* | *31.714.500* | *31.714.500* |
| c. | Alokasi Dana Desa | *387.917.000* | *396.677.000* | *397.025.000* |
| d. | Bantuan Keuangan | *10.035.000* |  |  |
| e. | Bantuan Provinsi | *55.000.000* | *55.000.000* | *61.000.000* |
| f. | Bantuan Kabupaten |  |  | 150.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| ***3.*** | ***Pendapatan Lain lain*** | 2.500.000 | ***55.400.000*** | ***42.100.000*** |
| a. | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | - | *52.900.000* | 39.600.000 |
| b. | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | *2.500.000* | *2.500.000* | 2.500.000 |
|  | ***JUMLAH TOTAL*** | ***1.790.000.000*** | ***1.878.498.000*** | ***1.878.498.000*** |

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pelaksanaan Pembangunan Desa; Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang akan dituangkan dalam RKPDesa yang terdiri atas jenis belanja: Pegawai; Barang dan Jasa; dan Modal.

Maka berdasarkan Rencana Pendapatan Desa di atas, maka dapat disusun Arah Kebijakan Belanja Desa Kalipelus berdasarkan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa dengan proyeksi Tahun 2020 sebagai berikut ini:

**Tabel**

**Belanja Desa Kalipelus**

**Tahun 2019 - 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  |  |  |
| **APB Desa Perubahan** | **APB Desa** | **Proyeksi** |
| 1 | 2 | *3* | *4* | *5* |
| ***B.*** | ***BELANJA*** | ***1.770.357.000*** | ***2.061.623.289*** | ***1.988.909.500*** |
| 1. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 815.868.900 | 934.626.600 | 858.189.500 |
| 2. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 477.982.000 | 486.629.700 | 558.872.000 |
| 3. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 9.800.000 | 20.822.000 | 23.208.000 |
| 4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 466.706.600 | 0 | 141.208.600 |
| 5. | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa | - | 619.544.989 | 376.800.000 |
|  | **JUMLAH TOTAL** | ***1.770.357.000*** | ***2.061.623.289*** | ***1.988.909.500*** |

Sedangkan Pembiyaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; dan Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

1. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
2. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
3. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Sehingga arah pembiayaan Desa Kalipelus di tahun 2021 adalah sebagai berikut ini:

**Tabel**

**Pembiayaan Desa Kalipelus**

**Tahun 2019 - 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **APB Desa Perubahan** | **APB Desa** | **Proyeksi** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| ***C.*** | ***PEMBIAYAAN*** | ***20.000.000*** | ***149.621.065*** |  |
| *1.* | ***Penerimaan Pembiayaan*** | **-** |  |  |
| a. | SILPA | **-** | **149.621.065** | **25.300.000** |
| b. | Pencairan Dana Cadangan | **-** | **-** |  |
| c. | Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan | **-** | **-** |  |
|  | ***JUMLAH ( RP )*** | **20.000.000** | **149.621.065** | **25.300.000** |
| *2.* | *Pengeluaran Pembiayaan* | **20.000.000** | **20.000.000** | **20.000.000** |
| a. | Pembentukan Dana Cadangan | **-** | **-** | **-** |
| b. | Penyertaan Modal Desa | **20.000.000** | **20.000.000** | **20.000.000** |
|  | ***JUMLAH ( RP )*** | ***20.000.000*** | ***129.621.065*** | ***5.300.000*** |

**BAB IV**

**PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA**

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Desa Kalipelus melalui RKP Desa pada tahun 2020 akan diarahkan sesuai dengan hasil evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya serta sesuai dengan permasalah dan isu strategis yang ada pada tahun 2021. Sehingga Rumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Desa ***Kalipelus*** pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

***1. Prioritas dan Sasaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah :***

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rancangan RKP Desa ***Kalipelus*** Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara **Tahun 2021**, maka dapat dirumuskan prioritas dan sasaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut :

* + 1. ***Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan*** ***Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa***

**Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan :**

1. Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dari ADD
2. Belanja Pegawai Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Pengelolaan tanah bengkok
3. Belanja Tunjangan Kedudukan BPD
4. Belanja Pegawai Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa

( PTPKD )

1. Belanja Pegawai Tunjangan petugas profil desa.

**1.Kegiatan Operasional Perkantoran :**

1. Belanja ATK
2. Belanja Barang dan jasa Listrik dan air
3. Belanja Benda Pos
4. Belanja alat listrik
5. Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih
6. Belanja makam minum rapat
7. Belanja barang dan jasa /Upah Pekerja Desa
8. Belanja pemeliharaan/perawatan kendaraan bermotor ( Mobil ambulan dan sepeda motor )
9. Belanja Modal Pengadaan Mobil ambulan Desa
10. Belanja Perjalanan dinas
11. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi
12. Belanja Transakasi dan keuangan admin Bank
13. Belanja Pajak Kendaraan Roda Empat dan Dua
14. Belanja barang dan jasa pajak tanah kas Desa

**2.Kegiatan operasional BPD :**

* Atk BPD

**3.Kegiatan operasional RT dan RT :**

* Belanja insentiv RT dan RW

**4.Kegiatan Saran dan Prasarana Kantor :**

* Belanja Peralatan Kantor

**5.Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa**

* Belanja ATK,Perjalanan Dinas,Makan minum rapat

**6.Kegiatan Pengelolan Informasi Desa**

* Belanja aset dan keuangan desa(Petugas Aset Desa dan Operator SID)

2. Prioritas dan Sasaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rancangan RKP Desa ***Kalipelus*** Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021, maka dapat dirumuskan prioritas dan sasaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

1. **Sub Bidang Pendidikan,** Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan

**Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**

- Pemberian insentif Guru TPQ

b**. Sub Bidang Kesehatan,** Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan

|  |
| --- |
| **Penyelenggaraan Posyandu** |
| ***Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil dan Balita, Kelas Ibu Hamil, Insentif Kader Posyandu dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan.*** |
| 1. Pemberian Insentif Kader POSYANDU |
| 2.Pengadaan PMT Kelas BUMIL |
| 3.Rapat Koordinasi Kesehatan ( RAKORKES ) |
| 4.Pemberian Insentif FKD |
| 5.Snack dan makan Rapat-rapat FKD |
| 6.Pemberian PMT BALITA |
| 7. Pemberian Insentif SKD |
| 8. Pemberian PMT BUMIL |
| ***Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD \*\**** |
| 1.Pengadaan Timbangan Bayi |
| ***Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/ kebersihan lingkungan/ jambanisasi/ mandi, cuci, kakus (MCK) \*\*;*** |
| Bantuan Jambanisasi |
|  |

**C.Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,** Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan

|  |
| --- |
| **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa \*\*** |
| 1. Rabat Beton Rt 03 Rw05 Dusun Penusupan dari Ban Keu Provinsi Jateng |
| 2. Pengaspalan Shand Sheet Dusun Bojongsari dari Ban Keu Provinsi Jateng |
| **Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin\*\*;** |
| 1.Pembangunan RTLH dari Ban Prov untuk 3 Unit RTLH |
| 2.Pembangunan RTLH dari Batuan APBN untuk 40 Unit RTLH |
| ***Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/ penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/ drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah\*\*;*** |
| 1.Pembangunan Drainase Dsn Bojongsari Rt 01 Rw 04 |

1. **Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi,** Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan

|  |
| --- |
| **Penyelenggaraan Informasi Publik Desa** |
| 1.Pengadaan Banner |
| 2.Pengadaan Smart Phone untuk Operator E HDW dan E DMC |
| 3.Insentiv Kader Pembangunan Manusia ( KPM ) sebagi Operator E HDW |
| 4.Pengadaan Komputer |

**3. Prioritas dan Sasaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rancangan RKP Desa ***Kalipelus*** Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021, maka dapat dirumuskan prioritas dan sasaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:

1.Pemberian Tunjangan LP3M;

2.Pemberian Tunjangan Pengurus dan anggota PKK Desa

3.Pembinaan PKK Kabupaten

4.Fasilitasi Kegiatan KPMD

5.Pemberian Insentiv LINMAS

**4. Prioritas dan Sasaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rancangan RKP Desa ***Kalipelus*** Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021, maka dapat dirumuskan prioritas dan sasaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

***A.Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)***

**,**Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:

Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan :

* Pembuatan Kolam Milik Desa dengan pola PKTD

1. **Prioritas dan Sasaran Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rancangan RKP Desa ***Kalipelus*** KecamatanPurwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020, maka dapat dirumuskan prioritas dan sasaran Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa sebagai berikut :

1. **Sub Bidang Penanggulangan Bencana Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:**
2. Penanganan PANDEMI COVID 19
3. Pemberian Bantuan Sembako pada masyarakat terpapar COVID 19
4. **Sub Bidang Keadaan Mendesak Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:**
5. Pemberian Jaring Pengaman Sosial yaitu Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa ( BLT DD )

**BAB V**

**RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DESA**

**BERDASARKAN BIDANG DAN SUB BIDANG**

Berdasarkan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Desa ***Kalipelus*** di Tahun 2020 berdasarkan berdasarkan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa dengan proyeksi Tahun 2021, disusunlah Rencana Program Kegiatan Prioritas Desa Berdasarkan Bidang dan Sub Bidang, baik berupa RKP Desa Tahun 2021 yang akan menjadi Pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun 2021, maupun Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2021 yang akan menjadi materi pembahasan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

Rencana Program Kegiatan Prioritas Desa berdasarkan Bidang dan Sub Bidang ***Kalipelus*** Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara ditetapkan dengan rincian sebagai berikut ini:

1. **RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DESA BERDASARKAN BIDANG, DAN SUB BIDANG RKP Desa TAHUN 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DESA BERDASARKAN BIDANG, DAN SUB BIDANG RKP Desa TAHUN 2021** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **No** | | **Bidang/Sub Bidang/Kegiatan** | | | | | | | | **Lokasi** | | **Volume** | | **Sasaran / Manfaat** | | **Waktu Pelaksanaan** | | **Biaya dan Sumber Pembiayaan** | | | | | **Pola Pelaksanaan** | | | | **Ren. Pelak. Kegiatan** | | | |  | |  | **-** | | **12.750.000** | | | **5.000.000** | | |  | | | | | |
|  | |  | **11.355.900** | | **22.000.000** | | | **102.000.000** | | | **1.561.749.448** | | | | | |
| **Bidang** | | | **Sub Bidang** | | |  | | **Jumlah (Rp.)** | | | **Sumber** | | **Swakelola** | | **Kerjasama Antar Desa** | | **Kerjasama dg Pihak Ketiga** | | |  |  | | | | **ADD** | | | **PAD** | | | **DD** | | | | | **PROV** | | | | **KAB** | | | | **SILPA** | | | | **PADS** | | | |  | | | |
| *a* | | ***b*** | | | *d* | | |  | | *g* | | *h* | | *i* | | *j* | | *k* | | | *l* | | *m* | | *n* | | *o* | | | *p* |  | | | | **421.385.000** | | | **29.500.000** | | | **920.902.000** | | | | | **25.000.000** | | | | **11.355.900** | | | | **9.250.000** | | | | **97.000.000** | | | | **1.514.392.900** | | | |
| I. | | **BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA** | | | ***Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa*** | | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa **( SILTAP)** | | **PEMDES** | | **1 Orang** | | **Terpenuhinya kesejahteraan Kepala Desa** | | **12 bulan** | | **36.000.000** | | | **ADD** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | | 36.000.000 | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa **( Dari Pengelolaan tanah Bengkok )** | | **PEMDES** | | **1 Orang** | | **Terpenuhinya kesejahteraan Kepala Desa** | | **12 bulan** | | **102.000.000** | | | **PADS** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa  **( Tunjangan Jabatan** ) | | **PEMDES** | | **1 Orang** | | **Terpenuhinya kesejahteraan Kepala Desa** | | **6 bulan** | | **900.000** | | | **PBH** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | | 2.400.000 | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa  **( SILTAP )** | | **PEMDES** | | **13 Orang** | | **Terpenuhinya Kesejahteraan Perangkat Desa** | | **12 bulan** | | **320.400.000** | | | **ADD** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | | 320.400.000 | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 90.000.000 | | | |  | | | |
|  | | |  | | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat **Desa ( Dari Pengelolaan Tanah Bengkok )** | | **PEMDES** | | **13 Orang** | | **Terpenuhinya Kesejahteraan Perangkat Desa** | | **12 bulan** | | **201.900.000** | | | **PADS** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa **(Tunjangan Jabatan )** | | **PEMDES** | | **13 Orang** | | **Terpenuhinya Kesejahteraan Perangkat Desa** | | **6 bulan** | | **7.200.000** | | | **PBH** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | | 16.200.000 | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | 5.000.000 | | | | 11.355.900 | | | |  | | | | 7.000.000 | | | |  | | | |
|  | | |  | | | ***Penyediaan Operasional Pemerintah Desa*** | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | | | ***Honor Pengelola Keuangan Desa :*** | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | | | 1. Honor PKPKD ( Kades ) | | **PEMDES** | | **1 tahun** | | **Terpenuhinya Tertib adimistrasi & Kesejahteraan Kepala Desa** | | **12 bulan** | | **3.600.000** | | | **PBH** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | | | 2. Honor Koordinator PPKD ( Sekdes) | | **PEMDES** | | **1 tahun** | | **Terpenuhinya Tertib adimistrasi & Kesejahteraan Perangkat Desa** | | **12 bulan** | | **3.000.000** | | | **PBH** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | | | 3. Bendahara PPKD | | **PEMDES** | | **1 tahun** | | **Terpenuhinya Tertib adimistrasi & Kesejahteraan Perangkat Desa** | | **12 bulan** | | **2.400.000** | | | **PBH** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | | | 4. Honor PPKD ( 5 orang ) | | **PEMDES** | | **1 tahun** | | **Terpenuhinya Tertib adimistrasi & Kesejahteraan Perangkat Desa** | | **12 bulan** | | **12..000.000** | | | **PBH** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | | | **HONOR PEKERJA DESA :** | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | | | 1. Honor Sopir Ambulan Desa | | **Pekerja Desa** | | **1 Org** | | **Terpenuhinya Kesejahteraan Pekerja Desa** | | **12 bulan** | | **9.000.000** | | | **PAD** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | | 18.000.000 | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | 2. Honor Perawat Jenazah | | **Pekerja Desa** | | **1 Org** | | **Terpenuhinya Kesejahteraan Pekerja Desa** | | **12 bulan** | | **9.000.000** | | | **PADS** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | | 18.000.000 | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Belanja Internet dan listrik :** | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 1. Belanja Internet | | **Pemdes** | | **1 TH** | | **Terpenuhinya kelancaran Pem Des** | | **12 bulan** | | **1.800.000** | | | **ADD** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | | 1.800.000 | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 2. Belanja listrik | | **Pemdes** | | **1 TH** | | **Terpenuhinya kelancaran Pem Des** | | **12 bulan** | | **4.560.000** | | | **SILPA ADD** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | | 4.560.000 | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | **Belanja Perjalanan Dinas :** | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | 1.Perjalanan Dinas Kecamatan | | **Pemdes** | | **65 Kali** | | **Terpenuhinya kelancaran Pem Des** | | **12 bulan** | | **1.625.000** | | | **ADD** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | | 1.625.000 | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | 2.Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten | | **Pemdes** | | **36 Kali** | | **Terpenuhinya kelancaran Pem Des** | | **12 bulan** | | **1.800.000** | | | **ADD** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | | 1.800.000 | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | 3.Perjalanan Dinas Luar Kabupaten | | **Pemdes** | | **4 Kali** | | **Terpenuhinya kelancaran Pem Des** | | **12 bulan** | | **1.400.000** | | | **PADS** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | | 1.400.000 | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | **Belanja ATK** | | **Pemdes** | | **1 Keg** | | **Terpenuhinya kelancaran Pem Des** | | **12 bulan** | | **7.648.000** | | | **PADS** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | | 7.648.000 | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | **Belanja Benda Pos :** | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | 1.Belanja Materai @ 5.000 | | **Pemdes** | | **62 Lmbr** | | **Terpenuhinya kelancaran Pem Des** | | **12 bulan** | | **186.000** | | | **PADS** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | | 186.000 | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | 2.Belanja Materai @ 10.000 | | **Pemdes** | | **161 lmbr** | | **Terpenuhinya kelancaran Pem Des** | | **12 bulan** | | **966.000** | | | **PADS** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | | 966.000 | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | **Belanja Pajak Mobil Opr Pemdes** | | **Pemdes** | | **1 Keg** | | **Terpenuhinya kelancaran Pem Des** | | **12 bulan** | | **1.300.000** | | | **DLL** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | | 1.300.000 | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | **Penyediaan Tunjangan BPD** | | **BPD** | | **1 tahun** | | **Terpenuhinya Kesejahteraan BPD** | | **12 bulan** | | **18.600.000** | | | **ADD** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | | 18.600.000 | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | **Penyediaan operasional BPD** | | **BPD** | | **1 tahun** | | **Terselenggaranya Operasional BPD** | | **12 bulan** | | **214.500** | | | **PLL** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | 850.000 | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | | **JUMLAH BIDANG I :** | |  | |  | | **858.189.500** | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 2. | | **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN** | | | **Sub Bidang Pendidikan** | | | **Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa** | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | | **-** | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Pengadaan Insentif Guru TPQ | | **TPQ Salafiyah dan Tpq Mambaul Hasan** | | **10 ORG** | | **Terpenuhinya Kesejahteraan Guru TPQ** | | **12 Bulan** | | **2.000.000** | | | **ADD** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | | **8.000.000** | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | **Sub Bidang Kesehatan** | | | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | **Penyelenggaraan Posyandu** | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil dan Balita, Kelas Ibu Hamil, Insentif Kader Posyandu dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 1. Pemberian Insentif Kader POSYANDU | | **5 posyandu** | | **35 org Kader** | | **Terpenuhinya Kesejahteraan Kader Posyandu** | | **12 Bulan** | | **54.600.000** | | | **DDS** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | | **47.520.000** | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 2.Pengadaan PMT Kelas BUMIL | | **POSYANDU DUSUN** | | **15 BUMIL** | | **Terpenuhinya Gizi Bumil dan Janinya** | | **12 Bulan** | | **2.500.000** | | | **DDS** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | | **2.415.000** | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 3.Rapat Koordinasi Kesehatan ( RAKORKES ) | | **RUMAH PERADES** | | **FKD,KADER POSYANDU,PKK ,BIDES,PUKESMAS DAN PEM DES** | | **Koordinasi FKD,Kader Posyandu ,Bides,Puskesmas dan Pemdes dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat** | | **12 Bulan** | | **14.400.000** | | | **DDS** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | | **12.600.000** | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | 4.Pemberian Insentif FKD | | **FKD** | | **Pengurus FKD** | | **Terpenuhinya insetif FKD** | | **12 Bulan** | | **2.336.000** | | | **DDS** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | | **2.310.000** | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | 5.Snack dan makan Rapat-rapat FKD | | **FKD** | | **Pengurus FKD** | | **Terpenuhinya Rapat-rapat FKD** | | **12 Bulan** | | **5.400.000** | | | **DDS** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | | **4.950.000** | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | 6.Pemberian PMT BALITA | | **POSYANDU DUSUN** | | **BALITA** | | **Terpenuhinyan PMT balita ,Peningkatan Gizi BALITA** | | **12 Bulan** | | **24.000.000** | | | **DDS** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | | **12.000.000** | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | 7. Pemberian Insentif SKD | | **SKD** | | **1 Org** | | **Terpenuhinya Kesejahteraan Kader SKD** | | **12 Bulan** | | **1.200.000** | | | **ADD** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | | **1.200.000** | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | 8. ATK POYANDU | | **5 POSYANDU** | | **5 DUSUN** | | **Tertib Administrasi POSYANDU** | | **12 Bulan** | | **1.095.000** | | | **DDS** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | | **2.250.000** | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD \*\*** | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | 1.Pengadaan Timbangan Bayi | | **5 POSYANDU** | | **5 bh** | | **Terpenuhinya sarana Posyandu tiap Dusun** | | **12 Bulan** | | **2.500.000** | | | **DDS** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | | **2.500.000** | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | **Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/ kebersihan lingkungan/ jambanisasi/ mandi, cuci, kakus (MCK) \*\*;** | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Bantuan Jambanisasi | | **MASYARAKAT** | | **17 Orang** | | **Terpenuhinya sarana kesehatan bagi Rumah Tangga Miskin** | | **12 Bulan** | | **57.562.000** | | | **DDS** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | | **68.000.000** | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa\*\*; | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas\*\*; | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | pengadaan alat bantu atau kebutuhan lainnya dari penyandang disabilitas. | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/ posyandu/ poskesdes/ polindes/ posbindu/reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan\*\*; dan | | **POSBINDU KIT** | | **5 POSYANDU** | | **Deteksi Dini Kesehatan, Mencegah, dan mengobati** | | **12 Bulan** | | **17.500.000** | | | **DDS** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | | **17.500.000** | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/ jambanisasi/mandi, cuci, kakus (MCK) \*\*; | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Pembangunan Air Bersih | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | Pemeliharaan Jalan Desa | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa \*\* | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 1. Pembangunan Rabat Beton | | **Rt 03 Rw 05** | | **800 M** | | **Terpenuhinya jalan yang baik untuk masyarakat ( Pengaspalan Shand Sheet )** | | **12 Bulan** | | **200.000.000** | | | **BAN KEU PROV** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | | **173.763.000** | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 2. Pengaspalan Shand Seheet | | **Dsn Bojongsari** | | **750 M** | | **Terpenuhinya jalan yang baik untuk masyarakat ( Pengaspalan Shand Sheet )** | | **12 Bulan** | | **200.000.000** | | | **BAN KEU PROV** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | | **119.383.000** | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | Sub Bidang Kawasan Permukiman | | | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin\*\*; | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | 1.Pembangunan RTLH | | **Bantuan RTLH untuk RTM** | | **40 Unit** | | **Pengentasan kemsikinan bagi RTM** | | **12 Bulan** | | **400.000.000** | | | **BAN KEU APBN** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | | **100.000.000** | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | 2.Pembangunan RTLH | | **Bantuan RTLH untuk RTM** | | **3 Unit** | | **Pengentasan kemsikinan bagi RTM** | | **12 Bulan** | | **36.000.000** | | | **BAN PROV** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/ penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/ drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah\*\*; | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | | **-** | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | 3.Pembangunan Saluran Pertanian | | **RT 01 RW 04** | | **350 M** | | **Terpenuhinyan saluran air yang baik** | | **12 Bulan** | | **181.560.000** | | | **DDS** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | | **53.743.000** | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | Pengelolaan Hutan Milik Desa | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup\*\*; | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Penanaman Bibit Tanaman | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa\*\*; | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air\*\*; | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai\*\*; | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/ pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi gedung pengungsian\*\*; | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah\*\*; | | **MASYARAKAT** | | **BH** | | **Terpenuhinya Tempat sampah di masing2 Dusun** | | **12 Bulan** | |  | | | **SILPA** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Pengelolaan usaha hutan Desa; | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Pembibitan tanaman pangan/ penggilingan padi/pengadaan saprodi/ pembukaan lahan pertanian/ percetakan lahan pertanian\*\*; | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/ pemasaran produksi pertanian\*\*; dan | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi | | | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | **Penyelenggaraan Informasi Publik Desa** | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Pengadaan Banner | | **PEMDES** | | **6 BH** | | **Terpenuhinya Informasi Publik APBDES Th berjalan** | | **12 Bulan** | | **800.000** | | | **DDS** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | | **800.000** | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/ radio Single Side Band (SSB) \*\*; dan | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Jaringan untuk memenuhi Layanan Administrasi Kependudukan, Siskeudesa, Sistem Informasi Desa dan keperluan lainnya di Desa seperti hardware, software dan Brainware | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | | **JUMLAH BIDANG II :** | | **-** | |  | | **940.902.000** | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 3. | | **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN** | | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | | | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | **Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat** | | | Pembinaan Lembaga Adat | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | **Insentif untuk LP3M** | | **Pengurus LP3M** | | **1 Th** | | **Terpenuhinya Kesejahteraan LP3M** | |  | | **3.000.000** | | | **ADD** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Pembinaan PKK | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | **1.Insentif untuk Kader PKK**  **2.Pembinaan PKK Kabupaten** | | **Pengurus PKK**  **Pengurus dan Kader Posyandu** | | **1 Th**  **1 Th** | | **Terpenuhinya Kesejahteraan Kader PKK**  **Tertib Administrasi PKK Desa** | |  | | **4.027.000**  **5.950.000** | | | **ADD**  **PAD** | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Sistem organisasi mayarakat adat; | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;  1.Insentiv LINMAS | | LINMAS | | 1 Th | | Terpenuhinya Insentiv LINMAS | |  | | 4.400.000 | | | DLL | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan; | | KPMD | | 1 KEG | | Terpenuhinya keg KPMD | |  | | 5.000.000 | | | BAN PROF | | **** | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; dan | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/pengembangan peran masyarakat Desa\*\*. | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | **JUMLAH BIDANG III :** | | | | **-** | |  | | **23.925.000** | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **4.** | | **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** | | | ***Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*** | | | Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | **1.Pembuatan Kolam Milik Desa**  **2.Pembuatan Gedung BLK** | | Pemdes  Pemdes | | 3 Kolam  1 Unit | | Meningkatkan PAD Desa  Menigkatka Ketrampilam | |  | | **138..089.400**  **1.500.000** | | | **DDS**  **APBN** | | **** | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | **10.000.000** | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | **Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga** | | | **Pemberian Bantuan Sosial/ Pemberian Santunan Kepada Keluarga Fakir Miskin/ Analisis Kemiskinan Secara Partisipatif Di Desa/ Penyelenggaraan Musyawarah Kelompok Warga Miskin, Warga Disabilitas, Perempuan, Anak, Dan Kelompok Marginal/ Penyusunan Usulan Kelompok Warga Miskin, Warga Disabilitas, Perempuan, Anak, Dan Kelompok Marginal** | | **Pemdes** | | **5 Dusun** | | **Terpenuhinya Data DTKS Yang valid** | |  | | **8.854.200** | | | **DDS** | | **** | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | | **JUMLAH BIDANG IV :** | |  | |  | | **138.089.400** | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |  | | | | | | **920.902.000** | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | |
| **5** | | **Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa** | | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | | | Penanggulangan Bencana | | **Masyarakat** | | **5 Dusun** | | **Terpenuhinya Bantuan Penanganan Bencana** | |  | | **10.000.000** | | | **DDS** | | **** | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | Sub Bidang Keadaan Darurat | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | Keadaan Darurat | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | Sub Bidang Keadaan Mendesak. | | |  | | **Masyarakat** | | **5 Dusun** | | **Terpenuhinya Jaring Pengaman Sosial ( JPS BLT DD )** | |  | | **376.800.000** | | | **DDS** | | **** | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | Keadaan Mendesak | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | | **JUMLAH BIDANG V :** | |  | |  | | **-** | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | **Penyertaan Modal Desa** | |  | |  | |  | |  | | **20.000.000** | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | Penyertaan Modal Desa (BUMDesa) | |  | |  | | 20.000.000 | |  | | 20.000.000 | | | BAN PROV | | **** | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | 20.000.000 | | | | |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | Dana Cadangan | |  | |  | | - | |  | | - | | | PBH | | **** | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | - | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | | **JUMLAH BIDANG** | | **I+II+III+IV+V :** | |  | |  | | **1.988.909.500** | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | |

1. DAFTAR USULAN RKP Desa KALIPELUS KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 MELALUI MEKANISME BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bidang/ Jenis Kegiatan** | | | | **Lokasi** | **Volume** | **Sasaran/ Manfaat** | **Prakiraan Waktu Pelaksa naan** | **Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan** | |
|
| **Bidang** |  | **Jenis Kegiatan** | | **Jumlah (Rp)** | **Sumber** |
| **(Bankeu Provinsi/ Bankeu Kabupaten)** |
|  |  | 01.02 | **Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa** | |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** | **01.02.01** | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Pengadaan Laptop | | PemDes | 2 unit | Terpenuhinya Sarana prasarana Kantor Desa | januari s/d Desember | **16.000.000** | Ban Keu Kabupaten |
|  |  |  | 2.Rehab Kantor Desa | | PemDes | 1 unit | Terpenuhinya Sarana prasarana Kantor Desa | januari s/d Desember | **200.000.000** | BAN KEU PROPINSI |
| **Jumlah Per Bidang 1** | | | | | | | | | **216.000.000** |  |
| **2** | **Pembangunan Desa** |  |  | **Sub Bidang Pendidikan** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Rehab TPQ Salafiyah Penusupan | TPQ Salafiyah | 1 Keg | Terpenuhinya Sarana prasarana Kantor Desa | januari s/d Desember | **200.000.000** | **BAN KEU PROP** |
|  |  |  | 2.Rehab RA MAARIF | RA Maarif | 1 Keg | Terpenuhinya Sarana prasarana Kantor Desa | januari s/d Desember | **200.000.000** | **BAN KEU PROP** |
|  |  |  | 3.Rehab SD III KALIPELUS | SD III Kalipelus | 1 Keg | Terpenuhinya Sarana prasarana Kantor Desa | januari s/d Desember | **175.000.000** | **BAN KEU KAB** |
|  |  |  | 4.Rehab MASJID USWATUN KHASANAH | Masjid Uswatun Khasanah | 1 Keg | Terpenuhinya Sarana prasarana Kantor Desa | januari s/d Desember | **25.000.000** | **BAN KEU KAB** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **02.04** | | **Sub Bidang Kawasan Permukiman** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin\*\*; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | 1.Pembangunan RTLH | Desa Kalipelus | 3 Unit | Terpenuhinya kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan | Januari s/d Desember | **36.000.000** | Ban Keu Prov |
|  |  |  |  | 2.Pembangunan RTLH | Desa Kalipelus | 20 Unit | Terpenuhinya kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan | Januari s/d Desember | **400.000.000** | Ban Keu APBN |
|  |  | **02.03** | | **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **02.03.04** | | **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa \*\*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1. Rabat Beton** |  |  |  |  | **205.000.000** | BAN KEU PROPINSI |
|  |  |  |  | **2. Pengaspalan Shand Seheet** |  |  |  |  | **205.000.000** | BAN KEU PROPINSI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang \*\*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani \*\* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.Jalan Usaha Tani Dusun Penusupan ( Poktan Sri Martani ) |  |  |  |  | **120.000.000** | BAN KEU KAB |
|  |  |  |  | 2.Jalan Usaha Tani Dusun Temanggungan ( Poktan Dewi Sri ) |  |  |  |  | **120.000.000** | BAN KEU KAB |
|  |  |  |  | 3.Jalan Usaha Tani Dusun Bojongsari (P I K) |  |  |  |  | **150.000.000** | BAN KEU KAB ( PIK ) |
| **Jumlah Per Bidang 2** | | | | | | | | | **1.836.000.000** |  |
| **3** | **Pembinaan Kemasyarakatan** |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Fasilitasi Kegiatan KPMD | Desa Kalipeus | 1 KEG | Terpenuhinya kegiatan KPMD | Januari s/d Desember | **5.000.000** | Ban Keu Prov |
| **Jumlah Per Bidang 3** | | | | | | | | | **5.000.000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Pemberdayaan Masyarakat** |  | | **Penyertaan Modal Bumdes** |  |  |  |  | 20.000.000 | Ban Keu Prov |
|  |  | **Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1.Pebangunan Balai Latihan Kerja ( BLK )** |  |  |  |  | 1.500.000.000 | BAN KEU APBN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jumlah Per Bidang 4** | | | | | | | | | **1.520.000.000** |  |
| **5** | **Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak** |  |  | **Sub Bidang Penanggulangan Bencana** |  |  |  |  | 10.000.000 | BAN KEU KABUPATEN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jumlah Per Bidang 5** | | | | | | | | | **10.000.000** |  |
|  | | | | | | | | |  |  |
| **JUMLAH TOTAL** | | | | | | | | | **3.587.000.000** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. DAFTAR USULAN RKP DESA KALIPELUS TAHUN 2022 SEKTORAL MELALUI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |  | |
| **No** | **Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan** | | | | | | | | **Lokasi** | | | **Volume** | | | | **Perangkat Daerah pengampu** | | | **Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan** | | |
| **Bidang** | **No** | **Urusan** | **Program** | | **Kegiatan** | | | **Jumlah (Rp)** | | **Sumber (APBD Kabupaten/ APBD Provinsi / APBN)** |
|
| **1** | **Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial** | 1 | Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini | | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah | | | PAUD NURUL ULUM Desa Kalipelus | | | 1 Unit | | | | Dindikpora | | | **70.000.000** | | APBD Kabupaten |
| 2 | Pendidikan | Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun | | Pembangunan gedung sekolah SD | | | SDN IV Desa Kalipelus | | | 1 Unit | | | | Dindikpora | | | **200.000.000** | | APBD Kabupaten |
| 3 | Pendidikan | Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun | | Pembangunan Talud Pendidikan Dasar | | | SDN III Desa Kalipelus | | | 1 Paket | | | | Dindikpora | | | **50.000.000** | | APBD Kabupaten |
| 4 | Pendidikan | Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun | | Pembangunan gedung sekolah MI Maarif | | | MI MA'ARIF Desa Kalipelus | | | 1 Paket | | | | Kemenag | | | **200.000.000** | | APBD Kabupaten |
|  |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | **-** | |  |
|  | |  | **TOTAL ( A )** | | | | | | | | | | | | | | | | **270.000.000** | |  |
| **2** | **Fisik / Sarana dan Prasarana Wilayah** | **1.** | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | **Peningkatan Jalan dan Jembatan** | | | **Pembangunan Jembatan Antar Desa Kalipelus dan Gumiwang** | | | **Desa Kalipelus** | | | | **20 m** | | | **DPUPR** | **350.000.000** | | **APBD Kabupaten** |
| **2.** | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | **Peningkatan Jalan dan Jembatan** | | | **Pembangunan jalan antar Desa Kalipelus dan Desa Parakan** | | | **Desa Kalipelus** | | | | **2 km** | | | **DPUPR** | **500.000.000** | | **APBD Kabupaten** |
|  |  | **3** | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | **Pembangunan IPAL** | | | **Pembangunan IPAL Dusun Penusupan Desa Kalipelus** | | | **Desa Kalipelus** | | | | **2 km** | | | **DPUPR** | **400.000.000** | | **APBD Kabupaten** |
|  |  |  | **TOTAL ( B )** | | | | | | | | | | | | | | | | **1.250.000.000** | |  |
| **3** | **Ekonomi dan Budaya** |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  |  | |  |
| **1** | **Pertanian dan Perikanan KP Kab. Banjarnegara** | | **Fasilitasi Pengembangan kambing untuk RTM** | | | **Fasilitasi Pengembangan kambing untuk RTM** | | | **Desa Kalipelus** | | | **40 Ekor** | | | | **DINSOS** | **100.000.000** | | **APBD Kabupaten** |
| **2** | **Pertanian dan Perikanan KP Kab. Banjarnegara** | | **Fasilitasi Permodalan KWT** | | | **Fasilitasi Permodalan untuk KWT** | | | **Desa Kalipelus** | | | **5 KWT** | | | | **DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN** | **100.000.000** | | **APBD Kabupaten** |
|  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  |  | |  |
|  | |  | **TOTAL (C )** | | | | | | | | | | | | | | | | **200.000.000** | |  |
|  | |  | **TOTA A+B+C** | | | | | | | | | | | | | | | | **1.720.000.000** | |  |

Indikator adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program kegiatan dalam sub Bidang maupun Bidang. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukan dengan pencapaian target indikator pembangunan Desa setiap tahun dalam RKPDesa sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Indikator Kinerja yang ingin dicapai dalam RKPDesa ***Kalipelus*** pada tahun 2021 meliputi hal-hal sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **Matrik Indikator Kinerja** | | | |  | |  |
|  |  | | **RKP Desa *Kalipelus* Kecamatan Purwanegara**  **Kabupaten Banjarnegara**  **Tahun 2021** | | | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INDIKATOR KINERJA** | | | **SATUAN** | **KONDISI CAPAI-AN KINERJA TAHUN** | **TARGET**  **CAPAIAN KINERJA**  **TAHUN** | |
| **2020** | **2021** | |
|  | ***1*** | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | |
| ***BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA*** | | | |  |  |  | |
|  | Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa | | |  |  |  | |
|  |  | 1.Tersedianya sarana perkantoran/ pemerintahan Desa | | % | **80** | **100** | |
|  |  | 2.Terkelolanya Aset Desa | | % | **70** | **100** | |
|  |  |  | |  |  |  | |
|  | Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan | | |  |  |  | |
|  |  | 1.Kepemilikan KTP-el | | % | **70** | **95** | |
|  |  | 2.Rasio bayi berakte kelahiran | | % | **90** | **95** | |
|  |  | 3.Rasio Pasangan berakte nikah | | % | **85** | **95** | |
|  |  | 4.Pengelolaan Arsip secara Baik | | % | **75** | **90** | |
|  | Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan | | |  |  |  | |
|  |  | 1.Tersedianya Perdes RPJMDesa | | Dokumen | **1** | **1** | |
|  |  | 2.Tersedianya Perdes RKPDesa | | Dokumen | **1** | **1** | |
|  |  | 3.Tersedianya Perdes APBDesa | | Dokumen | **2** | **2** | |
|  |  | 4.Tersedianya Perdes LPJ APBDesa | | Dokumen | **1** | **1** | |
|  |  | 5.Tersedianya Dokumen LKPPDesa, LPPDesa, AMJ dan ILPPDesa | | Dokumen | **3** | **3** | |
|  |  | 6.Meningkatnya Jumlah PADesa | | Rp. Juta | **12** | **12** | |
|  | Sub Bidang pertanahan | | |  |  |  | |
|  |  | 1.Sertifikasi Tanah Kas Desa/Bengkok | | Bidang | **1** | **1** | |
|  |  | 2.Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | | % | **100** | **100** | |
|  |  |  | |  |  |  | |
| ***BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA*** | | | |  |  |  | |
|  | Sub Bidang Pendidikan | | |  |  |  | |
|  |  | 1. Fasilitas PAUD milik Desa dalam kondisi baik | | % | **100** | **100** | |
|  |  | 1. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) | | % | **71,20** | **71,20** | |
|  |  | 1. Fasilitas Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa dalam kondisi baik | | % | **100** | **100** | |
|  |  |  | |  |  |  | |
|  | Sub Bidang Kesehatan | | |  |  |  | |
|  |  | 1.Persentase Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif | | % | **100** | **100** | |
|  |  | 2.Menurunnya Angka Kematian Bayi | | Kasus | **0** | **0** | |
|  |  | 3.Menurunnya Angka Kematian Balita | | Kasus | **0** | **0** | |
|  |  | 4. Menurunnya Balita Gizi Buruk | | Kasus | **0** | **0** | |
|  |  | 5.Menurunnya Angka Kematian Ibu | | Kasus | **0** | **0** | |
|  |  | 6.Fasilitas Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ Pos Kesehatan Desa dalam kondisi baik | | % | **100** | **100** | |
|  |  |  | |  |  |  | |
|  | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | |  |  |  | |
|  |  | 1.Panjang jalan Desa dalam kondisi baik | | % | **68** | **68** | |
|  |  | 2.Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang bersih dan aman | | % | **89,65** | **89,65** | |
|  |  |  | |  |  |  | |
|  | Sub Bidang Kawasan Permukiman | | |  |  |  | |
|  |  | 1.Rasio Rumah Layak Huni | | % | **83** | **83** | |
|  |  | 2.Persentase penduduk yang terlayani sanitasi dan air limbah yang memadai | | % | **60** | **60** | |
|  |  | 3.Rasio Rumah memiliki akses Jamban Sehat | | % | **90** | **90** | |
|  |  |  | |  |  |  | |
|  | Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup | | |  |  |  | |
|  |  | 1.Bertambahnya Penghijauan/ pelestarian lingkungan hidup | | % | **17** | **17** | |
|  |  | 2.Persentase Penanganan Sampah | | % | **28** | **28** | |
|  | Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika | | |  |  |  | |
|  |  | 1.Persentase Warga Desa yang bisa mengakses jaringan internet | | % | **50** | **50** | |
|  |  | 2.Penyelenggaraan informasi publik Desa (pembuatan poster/baliho informasi APBDesa dan/atau APBDesa) untuk warga dan lain-lain | | Dokumen | **3** | **3** | |
|  | Sub Bidang energi dan sumber daya mineral | | |  |  |  | |
|  |  | 1.Pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna di Desa | | Jenis | **1** | **1** | |
|  | Sub Bidang Pariwisata Desa | | |  |  |  | |
|  |  | 1.Kunjungan Wisatawan ke Desa | | Orang |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKAT DESA | | | |  |  |  | |
|  | Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat | | |  |  |  | |
|  |  | 1.Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas | | Kegiatan | **1** | **1** | |
|  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |
| ***BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA*** | | | |  |  |  | |
|  | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | | |  |  |  | |
|  |  | 1.Populasi Kambing/Domba | | Ekor | **140** | **148** | |
|  |  | 2.Populasi Sapi | | Ekor | **40** | **63** | |
|  | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | | |  |  |  | |
|  |  | 1.Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaran Desa | | Kegiatan | **1** | **2** | |
|  |  | 2.Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa/ Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kader Kesehatan Masyarakat Desa | | Kegiatan | **1** | **1** | |
|  |  | 3.Terfasilitasinya Kegiatan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangun Desa | | Kegiatan | **3** | **3** | |
|  |  |  | |  |  |  | |
|  | Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga | | |  |  |  | |
|  |  | 1.Penyandang Cacat (difabel / disabilitas) dan eks trauma yang mendapatkan pelayanan sosial dasar | | Orang | **3** | **3** | |
|  |  | 2. Penanganan Keluarga Miskin (BDT) | | Rumah Tangga Miskin | **10** | **44** | |
|  | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah | | |  |  |  | |
|  |  | 1. Jumlah UMKM di Desa | | Usaha | **2** | **5** | |
|  | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | | |  |  |  | |
|  |  | 1.Terbentuknya BUMDesa | | Jenis Usaha | **1** | **2** | |

**BAB VI**

**PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Desa ***Kalipelus*** Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 merupakan tindak lanjut transisi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalipelus Tahun 2020-2025 yang disesuaikan dengan prioritas arah kebijakan kabupaten Banjarnegara tahun 2021 berupa RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2017-2022, Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2017-2020, RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 dan Pedoman Sinkronisasi Dan Transisi Arah Kebijakan Prioritas Perencanaan Daerah Dengan Perencanaan Desa **Untuk Penyusunan RKPDesa Tahun 2021 Dan Daftar Usulan RKPDesa Tahun 2022 Di Kabupaten Banjarnegara**. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa ***Kalipelus*** Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 juga disesuaikan dengan kondisi kebutuhan Desa terkini.

Penyusunan RKP Desa Tahun 2021 dilakukan dengan berpedoman pada mekanisme dan tahapan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguan Desa dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pembangunan Desa.

Penyusunan RKP Desa Tahun 2021 telah dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

* 1. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  2. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
  3. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Desa;
  4. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  5. penyusunan rancangan RKP Desa;
  6. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
  7. penetapan RKP Desa.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalipelus berupa RKP Desa Tahun 2021 selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa ***Kalipelus*** Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021.

Sedangkan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2022 akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat yang menjadi materi pembahasan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 untuk kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Akhirnya, **Dokumen Rencana** **Kerja Pemerintah Desa *Kalipelus* Tahun 2021 dan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2022** ini adalah bagian dari ikhtiar nyata Pemerintah Desa Kalipelus untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga Alloh Subhanahu Wa Ta’ala meridhai dengan memberikan kemudahan dan kekuatan untuk dapat mensejahterakan warga Desa Kalipelus Aamiin Ya Robbal ‘Alamiin.

Kepala Desa Kalipelus

**HARTININGSIH**



**PERATURAN DESA KALIPELUS**

**NOMOR 15 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KALIPELUS ( RKPDES )**

**PERUBAHAN TAHUN 2021**

**DESA KALIPEUS**

**KECAMATAN PURWANEGARA**

**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BERITA ACARA**

**PENETEPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDES )**

**PERUBAHAN TAHUN 2021**

Pada hari ini **Rabu**  ,tanggal **Dua puluh tiga** bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh , bertempat di Balai Desa Kalipelus, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalipelus bersama Pemerintah Desa ,Forkompimcam Kecamatan Purwanegara,Ketua RT DAN RW Se Desa Kalipelus, PKK Desa Kalipelus,Tokoh Masyarakat ,LP3M Desa Kalipelus,mengadakan mengadakan rapat pembahasan dan penyepakatan terhadap Peraturan Desa tentang **Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Perubahan Tahun 2021** ,rapat di hadiri oleh :

1. Ketua BPD dan Anggota Desa Kalipelus;

2. Kepala Desa dan Perangkat Desa Kalipelus;

3.Forkompimcam Kecamatan Purwanegara;

4,Ketua RT dan RW Sedesa Kalipelus;

5.PKK Desa aKalipelus;

6.LP3M Desa Kalipelus

Setelah Kepala Desa menyampaikan **Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)**  **Perubahan** **Tahun 2021** kepada BPD dan setelah di lakukan pembahasan diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1**.** Dalam rapat BPD Desa Kalipelus,telah menyepakati pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut : untuk kelancaran jalanya pemerintahan dan pembangunan desa perlu segera di buat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2021**;**   |  | | --- | | 2. Pengadaan PMT Balita,LANSIA,BUMIL untuk pencegahan Stuntingdari Dana Desa; | | 3.Pembangunan RTLH 20 Unit dari bantuan APBN; | | 4.Pembangunan RTLH 3 Unit dari Ban Keu Prop ; | | 5.Pengaspalan Shand Sheet jalan Dusun Bojongsari dari BAN KEU PROV; | | 6.Pembangunan saluran Talang Rt 01 Rw 05 dari DD/PKTD ; | | 7.Pembangun kolam Milik Desa dari DD/PKTD;  8.Jambanisasi untuk 17 Org dari Dana Desa | | 9.Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Dewi Sri dari Ban Keu Kabupten;  10. Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Sri Martani dari Ban Keu Kabupten;  11.Pembangunan Dak Cor Gedung TPQ Salafiyah Dusun Penusupan dari Bantuan Keuangan Provinsi ;  12.Pembangunan Masjid Uswatun Khasanah Rt 04 Rw 03 dari Bantuan Keuangan Kabupaten;  13.Pembangunan RA Maarif dari Ban Keu Prov  14. Rehab Kantor Desa Kalipelus dari Bantuan Keu Provinsi Jawa Tengah;  15. Rabat Beton Rt 03 Rw 05 dari BAN KEU PROV;  16. Rehab SD N III Kalipelus dari Ban Keu Kab;  17.Bantuan POKDAKAN dari BAN KEU KAB;  18.Bantuan KWT MEKAR SARI dari BAN KEU KAB;  Selanjutnya Pemerintah Desa untuk segera membuat Peraturan Desa tentang **APBDES TA 2021 yang di bahas dan di sepakati bersama BPD** | |  | |
|  |

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratn Desa bersama Pemerintah Desa Kalipelus tentang Pembahasan dan Penyepakatan **Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)**  Perubahan **Tahun 2021,** yang selanjutnya dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kalipelus, 23 Desember 2020  BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  DESA KALIPELUS  KETUA,  **HERLAMBANG** |

**DAFTAR HADIR**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hari / Tanggal | : | Rabu, 23 Desember 2020 |
| W a k t u | : | Jam 13.00 Wib s/d Selesai |
| T e m p a t | : | Balai Desa Kalipelus |
| Acara | : | **Penetapan Perdes tentang RKPDES TH 2021** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N0** | **N A M A** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** | |
| 1 | **HERLAMBANG** | Ketua | 1………………… |  |
| 2 | **UJANG R** | Wakil Ketua |  | 2……………… |
| 3 | **SULISTYOWATI** | Sekretaris | 3………………… |  |
| 4 | **KOKO ANDRIYANTO** | Anggota |  | 4……………… |
| 5 | **YULIANTO** | Anggota | 5………………… |  |
| 6 | **PUJI WIDODO** | Anggota |  | 6……………… |
| 7 | **APRILIA DANIAR.K** | Anggota | 7………………… |  |

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**KETUA**

**HERLAMBANG**

**DAFTAR HADIR**

**PERANGKAT DESA KALIPELUS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hari / Tanggal | : | Rabu, 23Desember 2020 |
| W a k t u | : | Jam 13.00 Wib s/d Selesai |
| T e m p a t | : | Balai Desa Kalipelus |
| Acara | : | **Penetapan Perdes tentang RKPDES TH 2021** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N0** | **N A M A** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** | |
| 1 | **HARTININGSH** | Kepala Desa |  | 1…………… |
| 2 | **SUPANGAT** | Sekretaris Desa | 2……………… |  |
| 3 | **SUMADI** | Kaur Tata Usaha & Umum |  | 3……………… |
| 4 | **AFWAN LATIF** | Kaur Perencanaan | 4…………… |  |
| 5 | **LAELY NUR.H** | Kasi Pemerintahan |  | 5……………… |
| 6 | **SAMAUN** | Kasi Pelayanan | 6…………… |  |
| 7 | **YUNITA INDAH P** | Kaur Keuangan |  | 7.................. |
| 8 | **JOKO TRI.W** | Kasi Kesra | 8……………… |  |
| 9 | **TUTUR WARDOYO** | Kadus Tambangan |  | 9…………… |
| 10 | **AKBAR KURNIAWAN** | Kadus Temanggungan | 10………….. |  |
| 11 | **EKO SETIYO EDI** | Kadus Kalipelus |  | 11…………... |
| 12 | **JOKO TW** | Kadus Bojongsari | 12………… |  |
| 13 | **SUYUD** | Kadus Penusupan |  | 13………… |
| 14 | **SALAMUN** | Pekerja Desa | 14…………… |  |
| 15 | **JULIANTO** | Staf Kesra |  | 15……………… |
| 16 | **TEGUH HARDIAN** | Pekerja Desa |  | 17……………… |

**Kepala Desa Kalipelus**

**HARTININGSIH**

**DAFTAR HADIR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hari / Tanggal | : | Rabu, 23Desember 2020 |
| W a k t u | : | Jam 13.00 Wib s/d Selesai |
| T e m p a t | : | Balai Desa Kalipelus |
| Acara | : | **Penetapan Perdes tentang RKPDES TH 2021** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **ALAMAT** | **TANDA TANGAN** | |
| 1 |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  |  |  | 3 |  |
| 4 |  |  |  |  | 4 |
| 5 |  |  |  | 5 |  |
| 6 |  |  |  |  | 6 |
| 7 |  |  |  | 7 |  |
| 8 |  |  |  |  | 8 |
| 9 |  |  |  | 9 |  |
| 10 |  |  |  |  | 10 |
| 11 |  |  |  | 11 |  |
| 12 |  |  |  |  | 12 |
| 13 |  |  |  | 13 |  |
| 14 |  |  |  |  | 14 |
| 15 |  |  |  | 15 |  |
| 16 |  |  |  |  | 16 |
| 17 |  |  |  | 17 |  |
| 18 |  |  |  |  | 18 |
| 19 |  |  |  | 19 |  |
| 20 |  |  |  |  | 20 |
| 21 |  |  |  | 21 |  |
| 22 |  |  |  |  | 22 |
| 23 |  |  |  | 23 |  |
| 24 |  |  |  |  | 24 |
| 25 |  |  |  | 25 |  |
| 26 |  |  |  |  | 26 |
| 27 |  |  |  | 27 |  |
| 28 |  |  |  |  | 28 |
| 29 |  |  |  | 29 |  |
| 30 |  |  |  |  | 30 |
| 31 |  |  |  | 31 |  |
| 32 |  |  |  |  | 32 |
| 33 |  |  |  | 33 |  |
| 34 |  |  |  |  | 34 |
| 35 |  |  |  | 35 |  |
| 36 |  |  |  |  | 36 |
| 37 |  |  |  | 37 |  |
| 38 |  |  |  |  | 38 |
| 39 |  |  |  | 39 |  |
| 40 |  |  |  |  | 40 |
| 41 |  |  |  | 41 |  |
| 42 |  |  |  |  | 42 |
| 43 |  |  |  | 43 |  |
| 44 |  |  |  |  | 44 |
| 45 |  |  |  | 45 |  |

**Kepala Desa Kalipelus**

**HARTININGSIH**

**NOTULEN**

**DAN PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN**

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES ) PERUBAHAN TAHUN 2021**

**DESA KALIPELUS KEC.PURWANEGARA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hari / tanggal | : | Rabu, 23 Desember 2020 |
| Jam | : | 13.00 Wib s/d Selesai |
| Tempat | : | Balai Desa Kalipelus |
| Kehadiran | : | Laki-laki = orang  Perempuan = orang |
| Susunan Acara | : | 1. Pembukaan |
|  |  | 1. Sambutan Kepala Desa Kalipelus |
|  |  | 1. Sambutan Ketua BPD Desa Kalipelus |
|  |  | 1. Musawarah RKPDes Tahun 2021 dan MUSRENBANGDES Th 2022 |
|  |  | 1. Penutup |
| Pimpinan Rapat | : | Ketua BPD Desa Kalipelus |
| Uraian Jalannya Rapat | : | Pemimpin rapat di pimpin oleh sdr Herlambang ,dengan memberikan arahan Rancangan RKPDesa tahun 2021 ,dan saling memberikan argumen terhadap rancangan tersebut |
| Hasil Rapat | : | 1.Dalam rapat BPD Desa Kalipelus,telah menyepakati pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut : untuk kelancaran jalanya pemerintahan dan pembangunan desa perlu segera di buat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2021**:**   |  | | --- | | 2. Pengadaan PMT Balita,LANSIA,BUMIL untuk pencegahan Stuntingdari Dana Desa; | | 3.Pembangunan RTLH 20 Unit dari bantuan APBN; | | 4.Pembangunan RTLH 3 Unit dari Ban Keu Prop ; | | 5.Pengaspalan Shand Sheet jalan Dusun Bojongsari dari BAN KEU PROV; | | 6.Pembangunan saluran Talang Rt 01 Rw 05 dari DD/PKTD ; | | 7.Pembangun kolam Milik Desa dari DD/PKTD;  8.Jambanisasi untuk 17 Org dari Dana Desa | | 9.Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Dewi Sri dari Ban Keu Kabupten;  10. Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Sri Martani dari Ban Keu Kabupten;  11.Pembangunan Dak Cor Gedung TPQ Salafiyah Dusun Penusupan dari Bantuan Keuangan Provinsi ;  12.Pembangunan Masjid Uswatun Khasanah Rt 04 Rw 03 dari Bantuan Keuangan Kabupaten;  13.Pembangunan RA Maarif dari Ban Keu Prov  14. Rehab Kantor Desa Kalipelus dari Bantuan Keu Provinsi Jawa Tengah;  15. Rabat Beton Rt 03 Rw 05 dari BAN KEU PROV;  16. Rehab SD N III Kalipelus dari Ban Keu Kab;  17.Bantuan POKDAKAN dari BAN KEU KAB;  18.Bantuan KWT MEKAR SARI dari BAN KEU KAB; | |  | |
| Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat | : | Dalam rapat BPD Desa Kalipelus,Rencana Kerja Pemerintahan Desa Perubahan Tahun 2021 di sesuaikan dengan RPJMDes Desa Kalipelus dan **Permendesa No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Desa Kalipelus |
| Pimpinan Rapat  **( HERLAMBANG )** | Notulen  **( SULISTYOWATI )** |

**FOTO**

**PENETAPAN RKPDES PERUBAHAN TH 2021**

**BERSAMA FORKOMPIMCAM,LEMBAGA DESA,**

**TOKOH MASYARAKAT DAN PKK DESA KALIPELUS**



****

**FOTO PENETAPAN RKPDES TH 2020**

**BERSAMA FOTKOMPIMCAM,LEMBAGA DESA,**

**TOKOH MASYARAKAT DAN PKK DESA KALIPELUS**



